

Judul : Jangan pilih lagi anggota DPR malas
Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Jangan Pilih Lagi Anggota DPR Malas

Momen ini menjadi kesempatan publik mengevaluasi petahana apakah layak atau tidak dipilih kembali.

FAUSTINUS NUA
faustinus@mediaindonesia.com

PEMANDANGAN jamak lagi-lagi terpampang di dalam gedung parlemen. Rapat Paripurna Ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, yang digelar kemarin, kembali minim peserta. Rapat yang dibuka dan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufril Dasco Ahmad itu hanya dihadiri 36 orang secara fisik dan 215 orang melalui daring. Sebanyak 150 orang izin dan sisanya tidak diketahui.

Meski demikian, rapat dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan rencana kerja pemerintah tahun 2024 itu tetap dinyatakan kuorum oleh pimpinan rapat karena dihadiri anggota dari seluruh fraksi di DPR.

Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen In-

donesia (Formappi) Lucius Karus menyebut minimnya kehadiran anggota DPR di rapat paripurna memang sudah menjadi pemandangan biasa. Kemalasan anggota DPR mengikuti rapat paripurna pun bukan cerita baru.

Namun, terlebih di masa-masa menjelang Pemilu 2024, Lucius menengarai boleh jadi ada kepentingan lain di balik ketidakhadiran rapat itu. Ia menduga para anggota DPR saat ini tengah sibuk mempersiapkan kampanye agar bisa kembali merebut kursi parlemen di 2024.

"Pemilu 2024 sudah dekat dan anggota DPR butuh menang. Karena dari sisi kinerja tak ada yang bisa dijual, maka anggota DPR mesti seperti caleg haru yang harus berjibaku dari kampung ke kampung untuk berkampanye," ujarnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Senada, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Angraini menilai menurunnya

tingkat kehadiran anggota DPR dan mandeknya fungsi legislasi menjadi fenomena yang tidak asing setiap menjelang pemilu. "Masa-masa ketika sudah memasuki tahapan krusial pemilu memang menjadi fase krusial bagi kinerja anggota DPR," ucap Titi, kemarin.

Akan tetapi, di sisi lain, ia melihat kondisi ini justru bisa menjadi ajang bagi para pemilih untuk lebih cermat dan kritis dalam menilai performa anggota DPR yang sedang menjabat. Terutama mereka yang kembali maju mencalonkan sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2024. "Momen ini mesti menjadi kesempatan bagi publik untuk mengevaluasi para petahana, apakah layak atau tidak dipilih kembali," kata Titi.

"Jangan pilih anggota DPR yang malas dan tidak amanah dalam bekerja. Terutama yang mengabaikan kerja kedewanan hanya demi kepentingan *nyaleg* di pemilu," tegasnya.

Agenda ke depan

Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR Lukluk Nur Hamidah membenarkan anggota DPR yang hadir secara

Kehadiran DPR dalam Rapat Paripurna Ke-28 Masa Persidangan 2022-2023

Keterangan	Jumlah
▪ Hadir fisik	36
▪ Hadir virtual	215
▪ Izin	150
▪ Total	401



Kepercayaan terhadap DPR

Keterangan	Persentase
▪ Sangat percaya	8
▪ Cukup percaya	44
▪ Kurang percaya	29
▪ Tidak percaya	14
▪ Tidak tahu	6



Tren Kepercayaan terhadap DPR

Bulan	Persentase
▪ Januari	52
▪ Februari	57
▪ April	52

Keterangan: Survei dilakukan pada 31 Maret-4 April 2023 terhadap 1.229 responden melalui nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sumber: OPF/LSU/UBang MI

fisik dalam rapat paripurna kemarin tidak sampai 50 orang. Namun, ia membantah kalau itu disebabkan oleh kemalasan anggota dewan.

Ia menjelaskan, biasanya agenda rapat paripurna dikabarkan hanya dua atau tiga hari sebelum hari H. Karena itu, banyak anggota DPR lebih memilih agenda yang menurut mereka lebih urgen, seperti bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan (dapil). "Bukan karena malas, tapi ada di dapil. Kadang kita punya agenda dengan konstituen," paparnya.

Anggota Fraksi PPP DPR Ar-

sul Sani mengatakan jumlah peserta sidang paripurna yang minim kehadiran secara fisik disebabkan banyak anggota dewan yang sedang berada di dapil. Namun, kata dia, Fraksi PPP telah menginstruksikan semua anggota harus hadir meski secara daring.

Adapun Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonon Daulay menyebut kehadiran anggota fraksinya disepakati melalui kehadiran wakil di setiap komisi. Menurutnya, dalam mekanismenya juga diterapkan sanksi jika anggota tidak hadir tanpa memberitahukan kepada fraksi. (Sru/Rif/X-3)